

KEBIJAKSANAAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS) DALAM PENGUATAN IDEOLOGI BERDASARKAN 4 DASAR KONSENSUS NEGARA

Ragil Ira Mayasari¹⁾, Titik Khusumawati²⁾, Irwan Swandana³⁾, Lucius Andik Rahmanto⁴⁾

¹Ilmu Hukum, Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto

email: Maiaaga38@gmail.com

²Ilmu Hukum, Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto

email: ptitikkhusumawati@gmail.com

³Ilmu Hukum, Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto

email: irwanswandana@gmail.com

⁴Ilmu Hukum, Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto

email: andik.rahmanto@gmail.com

Abstract

One aspect of the goal of national education is to form human beings who have noble ethics. The 2021 Virtual Training on Strengthening National Values (TAPLAI) is one of the government's efforts through the National Resilience Institute (Lemhannas) in strengthening national values. The purpose of the Virtual Training on Strengthening National Values (TAPLAI) is to overcome existing differences and problems through comprehensive, integral, and holistic mindsets, attitudes, and actions, in order to maintain the integrity of the Republic of Indonesia. Indonesia, which has an ideology based on the Four Foundations of the Unity of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution, Pancasila, the Republic of Indonesia, and Sesanti Bhinneka Tunggal Ika), has a strong national insight. This study uses a normative legal research method with a legislative approach, namely studying and understanding laws and regulations and understanding the implications of positivizing the general principles of good governance in the administration of government. This research also uses a conceptual approach, namely looking for principles, principles and doctrines related to this research. This scientific activity is not based on a review of one discipline, but the perspective of an educational discipline. However, this research is still a legal research. This refers to the perspective of the legal discipline used in its implementation. The 2021 Virtual Training for Strengthening National Values (TAPLAI) which was held for ± 10 days obtained significant results, namely an increase of 913 points and an average of 12.17 in the sense of "very satisfied" in building a sense, understanding, and enthusiasm to implement national values sourced from the Four Basic Consensuses of Indonesia in their respective environments.

Keywords: Policy, ideological strengthening, State Consensuses

PENDAHULUAN

Salah satu aspek dari tujuan Pendidikan Nasional adalah membentuk manusia yang memiliki budi pekerti luhur (Nurmalisa & Adha, 2016). Bagaimana manusia memiliki etika yang luhur, yaitu harus dijadikan landasan nilai dalam ideologi. Ideologi sendiri sangat penting keberadaannya dalam perspektif ketahanan nasional NKRI, mengingat

ideologi itu sendiri merupakan salah satu faktor pembentuk karakter Bangsa, antara lain: 1) Sejarah lahirnya Bangsa, Negara dan tanah air, 2) cita-cita, 3) dan Ideologi Bangsa. Penelitian Anugerah (Anugerah, 2020) menjelaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang ada di Indonesia merupakan nilai-nilai yang harus dijaga dan ditanamkan secara berkesinambungan agar selalu melekat pada setiap masyarakat Indonesia. Seperti yang kita

ketahui, nilai-nilai kebangsaan harus mencakup norma-norma kebaikan yang menjadi ciri khas kepribadian Bangsa Indonesia. Indonesia memiliki empat konsensus dasar yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain: UUD 1945, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika (Hastangka et al., 2019). Keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia, jika dikelola dengan bijaksana, menjadi modal dasar sumber daya manusia..(Sumardjoko dkk., 2018).

Namun, ada pro dan kontra ketika ada penghapusan P4 atau Ekaprasetya Pancakarsa. Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 yang memuat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, ditetapkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/ MPR/1998. Keputusan ini mengembalikan peran Pancasila sebagai dasar negara, menghapuskan P4, dan menghapus Pancasila sebagai satu-satunya dasar organisasi sosial dan politik di Indonesia (Albintani, 2017). Terlepas dari pro dan kontra, terutama di era Reformasi saat ini, bangsa Indonesia sedang mengalami “de-ideologisasi” Pancasila.(Sugiarti dkk., 2020).Hal ini terlihat dari nilai-nilai luhur sila, dan tiga konsensus lainnya yang semakin terkikis, lalu bagaimana cara mengimplementasikan wawasan kebangsaan berdasarkan empat konsensus dasar negara saat ini? Yang perlu kita ketahui adalah, Implementasi kebijakan bukanlah tugas yang mudah, karena memerlukan navigasi dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan masing-masing, dan kurangnya formulasi yang jelas dalam kebijakan yang diterapkan.(Nadeak, 2014).

Ada beberapa upaya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Diantaranya ada beberapa cara yang bisa ditempuh, adapun cara yang tersedia tergantung dari keahlian masing-masing masyarakat. Cara-cara tersebut antara lain: (1) meningkatkan semangat gotong royong; (2) berbagi data tentang makna nasionalisme kepada warga negara; (3) memperingati setiap hari libur nasional dalam tinjauan hari libur nasional; (4) membentuk asosiasi dan organisasi yang berorientasi pada rakyat; (5) diskusi dengan kaum nasionalis tentang masalah nasionalisme seni. (Suryatni, 2016). Padahal menurut penelitian Suriata(Suriata, 2019), Setiap warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Dibutuhkan SDM yang berkualitas mulai dari keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga akuntabilitas(Masbiran dkk., 2021). Oleh karena itu, Aspirasinya adalah adanya kolaborasi antar berbagai pihak untuk memperkuat prinsip-prinsip inti yang mendefinisikan bangsa, dan memberikan manfaat bagi setiap segmen masyarakat Indonesia. Era reformasi merupakan momen yang tepat bagi Indonesia untuk membangun kembali kerangka ketatanegaraan yang telah menyimpang dari jalur demokrasi konstitusional.(Mahardika, 2019).

Implementasi nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter bangsa dapat dikembangkan melalui berbagai cara, seperti dalam pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal dalam keluarga, serta pendidikan nonformal di kemudian hari.(Retno dkk., 2021). Dengan kuatnya karakter bangsa negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh

bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat kita, moralitas dan nasionalisme mereka akan tercermin dalam perspektif keamanan nasional. Menurut penelitian Apriandi (Apriandi, 2017), Dalam konteks pengambilan keputusan, implementasi melibatkan pengambilan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk menerjemahkan keputusan ke dalam strategi praktis dan menghasilkan perubahan yang diinginkan, baik perubahan signifikan maupun kecil. Pada dasarnya, implementasi adalah proses memahami hasil yang diharapkan setelah program dilaksanakan. penelitian Setiawan (Setiawan & Ode, 2019) menyatakan bahwa setelah suatu kebijakan dibuat, kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia. Selanjutnya, kebijakan ini perlu dievaluasi agar dapat digunakan sebagai mekanisme pemantauan, memastikan kebijakan tersebut mencapai tujuannya.

Perlu kita ketahui, Salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama terkait dengan penyiapan sumber daya manusia yang siap bersaing di era global, adalah krisis nilai-nilai karakter bangsa. (Anik, 2010), Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang efektifitas kegiatan Pemantapan Nilai Nasional (TAPLAI) secara virtual berdasarkan 4 Dasar Musyawarah Negara sebagai upaya menjaga ketahanan nasional NKRI. Indonesia di tengah krisis nilai-nilai karakter Bangsa yang dialami bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif yang secara khusus berfokus pada aspek perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan sekaligus mengkaji akibat penerapan prinsip-prinsip umum good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu mencari prinsip, prinsip dan doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif meliputi studi tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. (Soerjono, 2016). Dalam proses melakukan penelitian bahan pustaka, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan tertentu yang diteliti. Data ini mencakup bahan hukum primer, yaitu

- a. sumber perpustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Sumber daya hukum tambahan, khususnya sumber daya yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses pemeriksaan,
- c. Bahan hukum tersier mencakup ensiklopedi dan kamus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, konsep pembangunan nasional diartikan sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tetap

mempertimbangkan tantangan pembangunan global. Program pembangunan hanya dapat berlangsung berkat dukungan sumber daya manusia yang unggul untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan, namun lingkungan juga merupakan penerima dampak terbesar dari pelaksanaan pembangunan,

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Nasional, seperti yang diatur dalam Bab III Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan implementasi nilai-nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selain itu, penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Nasional juga merupakan upaya untuk mengoptimalkan pengembangan dan peningkatan kinerja demokrasi daerah berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia,

Lemhannas, juga dikenal sebagai Ketahanan Nasional Republik Indonesia, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia. Tanggung jawab utamanya mencakup kepemimpinan tingkat nasional, penilaian strategis terhadap ketahanan nasional, dan penguatan nilai-nilai nasional.(Rukmana dkk., 2020). Peran adalah gambaran tugas dan fungsi, berbicara tentang peran, kemudian yang akan dibahas adalah tentang tugas dan fungsi karena peran dan fungsi merupakan satu kesatuan seperti mata uang, peran adalah perilaku atau

tindakan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan tugasnya. dan fungsi(Gunawan, 2015)

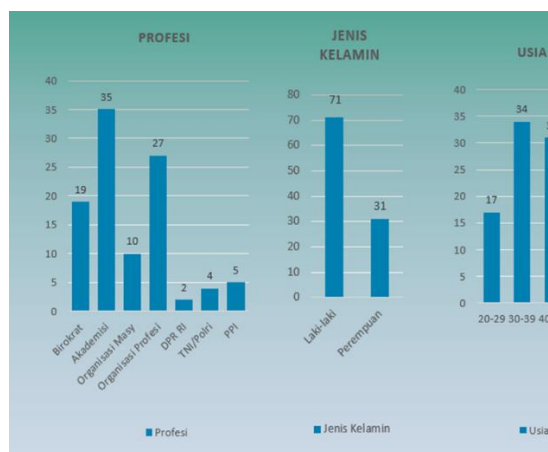
Pelatihan Virtual Penguatan Nilai Kebangsaan (TAPLAI) 2021

Pertumbuhan e-learning yang fenomenal di negara-negara maju membuat Indonesia mengikuti tren dengan berinvestasi besar-besaran di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).(Sarbaini dkk., 2019). Internet telah membuat kolaborasi antarbudaya lebih praktis karena para pendidik sekarang dapat menyatukan orang-orang dari wilayah geografis yang berbeda dengan hampir tanpa biaya(Ahmad & Hoter, 2019). Pelatihan Virtual Penguatan Nilai Kebangsaan (Taplai) merupakan salah satu penerapan TIK dalam bidang pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Penguatan Nilai Kebangsaan (Taplai) adalah singkatan dari kegiatan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan(Lemhannas, 2020). dalam kegiatan ini, peserta diharapkan dapat menyatukan ide menuju persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dimana knowledge sharing menjadi mediator antara kepemimpinan dan inovasi.(Anis dkk., 2021). Kegiatan Penguatan Nilai Nasional (Taplai) sendiri merupakan salah satu kebijakan publik yang diselenggarakan oleh lemhannas RI. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon pemerintah terhadap suatu permasalahan, yang mencakup serangkaian tindakan, sehingga menonjolkan sifat prosedural dari kebijakan publik.(Nadeak, 2014).

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Virtual Penguatan Nilai Kebangsaan (Taplai) ini adalah 1). memperkuat nilai-

nilai kebangsaan kepada seluruh komponen bangsa, 2). membuat dan memperluas agen perubahan, 3). memperkuat kepemimpinan. Sedangkan sasaran yang dituju, yaitu: 1). Mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan secara sungguh-sungguh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan suatu ikhtiar yang sangat penting, 2). pembangunan karakter bangsa bagi seluruh komponen bangsa, 3). terwujudnya agen perubahan yang bercirikan karakter bangsa, 4). penciptaan kader pemimpin yang berwatak dan berwawasan kebangsaan.

Gambar 2. Latar belakang peserta



Pelatihan Virtual Penguatan Nilai Kebangsaan (Taplai) Batch 4 dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 10 November 2021 dengan jumlah peserta 100 orang dengan latar belakang seperti pada gambar berikut. Dari data di atas terlihat 35 peserta berasal dari kalangan akademisi, 27 organisasi profesi, 10 organisasi masyarakat, 19 birokrat, 4 anggota TNI, 2 DPR RI, 2 PPI, dan 2 asing. Jumlah peserta sebanyak 102

orang, namun 2 diantaranya tereliminasi karena melanggar kebijakan yang telah ditentukan. Latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang kuat untuk mengukur bagaimana penilaian masyarakat tersebut menginterpretasikan kebijakan publik. Seperti yang kita ketahui, latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang kuat untuk mengukur bagaimana penilaian masyarakat tersebut menginterpretasikan kebijakan publik (Rivai, 2017). Sangat jelas bahwa untuk membangun Indonesia yang maju di tengah dunia yang penuh disrupsi (Volatility, Uncertainty, Compexity, Ambiguity), selain intelektualitas dan kreativitas, faktor mental berupa nilai-nilai (Pancasila), moralitas, dan identitas sangat penting. dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi Sumber Daya Manusia yang Unggul. Terkait dengan hal tersebut, menurut Sigmund Freud yang populer dikenal sebagai bapak psikoanalisis (1856-1939), Jiwa memiliki tiga tingkatan kesadaran, yaitu jiwa bawah sadar, jiwa bawah sadar, dan jiwa sadar yang terdiri dari pikiran dan perasaan. .

Menyadari bahwa karakter yang terbentuk selain dari intelektualitas dan kreativitas masih tidak dapat disangkal, bahwa terdapat fondasi budaya yang kuat yang masih menjadi dasar konsensus negara. Karakter bangsa yang bermufakat pada 4 pilar dasar kebangsaan, yaitu; UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang ideal. Dalam hal ini juga menuntut bangsa Indonesia memiliki wawasan kebangsaan. Menurut Mayjen TNI pur. E. Imam Artinya; dalam presentasinya di Lemhanas Penguatan Nilai Nasional

(Taplai); yang harus kita miliki, artinya membangun sikap saling percaya untuk memperkuat persatuan bangsa, menjadi kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan (common musuh),

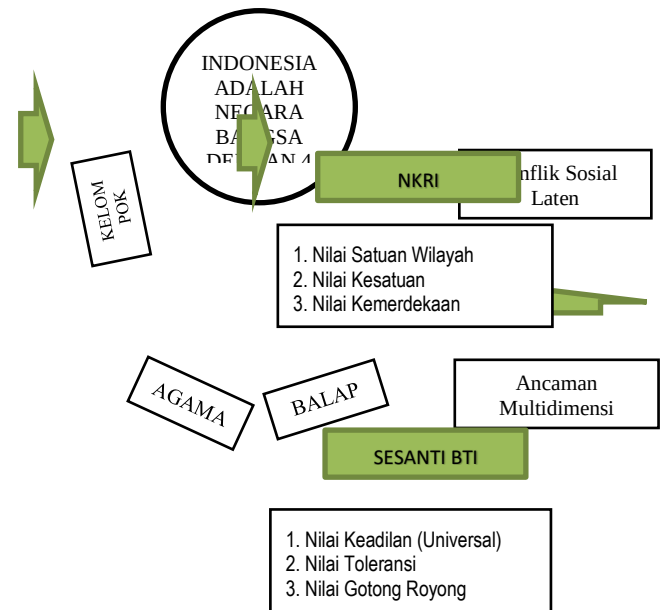
Kegiatan Taplai Virtual yang diselenggarakan Lemhannas di masa pandemi ini tidak mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta yang mendaftar seperti yang sudah termasuk, pemateri yang profesional dan relevan di bidangnya, susunan acara dan prestasi yang diraih dengan baik. Adapun materi dan pemateri pada saat kegiatan, yaitu:

Tabel 1. Materi dan Pembicara
Kegiatan Penguatan Nilai Nasional
(Taplai) Virtua

1	Pengantar Nilai Nasional dan Sejarah Perjuangan Bangsa	Dr Anhar Gonggong
2	Pengembangan Lingkungan Strategis JPPISB Vol.03 No.01 (2024) http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB	Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan E-issn : 2809-9508 https://doi.org/10.47233/jppisb.v3i1.1576
3	Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Laksda TNI Suratno, SH, MH
4	Terwujudnya Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Prof.Dr.Ir. Dadan Umar Daihani, DEA
5	Terwujudnya Kesadaran Nasional dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.IP., M.Sc
6	Pelaksanaan Kepemimpinan Nasional dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Mayjen TNI (Purn) Juwondo
7	Pentingnya Ideologi Bagi Pembangunan Bangsa	Yudi Latif, MA, Ph.D
8	Implementasi Nilai Nasional Bersumber dari Pancasila	Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, SE
9	Penggabungan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus dilakukan	Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. E. Winarto Hadiwasito, SH, M.Si
10	Implementasi Nilai Nasional Bersumber dari Sesanthe Bhinneka Tunggal Ika	Prof.Dr.Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si
11	Implementasi Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari NKRI	Laksda TNI (Purn) Bambang Darjanto, SH, S.Pi., M.Sc
12	Aktualisasi dan Penegakan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Nilai Kebangsaan dalam NKRI	Dr.Hj. Hesti Armiwulan S., SH, M.Hum
13	Revolusi Mental dalam Rangka Pembangunan Karakter Bangsa	Ir. Hamry Guzman Zakaria, MM
14	Dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka penerapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Kebangsaan sangatlah penting	1. Irjen Pol Drs. Mulyatno, SH, MM 2. Brigjen TNI (Mar) Yuliandar TD 3. Laksma TNI P. Rahmad Wahyudi, SE 4. Laksma TNI (Purn) Budi Utomo 5. Dr.Ir. Mochammad Yunus, M.Eng

Berdasarkan data di atas, bahwa kekayaan materi dan latar belakang pendidikan serta profesionalisme para penyaji menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan Lemhannas Virtual Penguatan Nilai Nasional (Taplai) generasi ke-4 tahun 2022. Materi pelaksanaan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan simulasi proporsional, sehingga mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menyenangkan. Selama kegiatan, peserta diarahkan untuk melakukan diskusi kontekstual tentang pentingnya mengimplementasikan penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,

Adapun materi dan pemateri diadaptasi dari konsep yang ada dan disesuaikan dengan maksud dan tujuan kegiatan Penguatan Nilai Nasional (Taplai) itu sendiri. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:



Prinsip moral sebagai pedoman perilaku bagi seluruh warga negara Indonesia sangat diperlukan untuk dapat mengkomunikasikan berbagai perbedaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, serta membangun kesadaran kolektif sehingga tercipta suasana kehidupan yang serasi/harmonis, dan dapat menyatukan segala upaya untuk mencapai tujuan dan cita-cita untuk hidup bersama sebagai bangsa Indonesia.



evaluasi dalam menganalisis efektivitas strategi. Berdasarkan Mc. Dalam teori screening Namara, pemilihan alternatif strategi ditentukan dengan mempertimbangkan lima kriteria yaitu kemudahan, efektifitas, waktu, manfaat, dan biaya.(Susianti, 2017) Evaluasi peserta dilakukan oleh fasilitator terhadap beberapa peserta dalam kelompoknya melalui observasi selama kegiatan sesuai jadwal. Dalam evaluasi ini, rentang nilai digunakan:

Tabel 2. Rentang Evaluasi Nilai Peserta

RATA-RATA	KATEGORI
Dibawah 50	Sangat kurang
51-70	Lebih sedikit
71-79	Adil
80-85	Bagus
86-89	Baik sekali
90-93	Puas
94-Atas	Sangat Puas

Hasil observasi fasilitator menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) kategori penilaian yaitu Disiplin, Aktifitas, Sikap dan Perilaku, peserta Kelas IV mencapai skor 1.965 dengan rata-rata 93,56 untuk ketiga kategori penilaian. Dengan adanya fasilitator, peserta cenderung lebih disiplin, aktivitas dan sikap serta

perilakunya meningkat, dari rata-rata 85 pada hari pertama menjadi 99 pada hari ketujuh. Secara rinci, hasil penilaian fasilitator terhadap peserta dapat diuraikan sebagai berikut.

Disiplin peserta

1). Hasil observasi bahwa kedisiplinan peserta yang diukur dengan tingkat kehadiran mencapai rata-rata kehadiran 99,71 persen (Sangat Puas). 2). Tingkat kehadiran terendah pada hari ketiga dan kelima, dari 100 peserta, hadir 99 orang atau 99 persen (Sangat Puas). 3). Tingkat kehadiran tertinggi dicapai pada hari pertama, kedua, keempat, keenam, dan ketujuh yaitu dari 100 peserta yang hadir mencapai 100 orang atau 100 persen (Sangat Puas).

Kegiatan peserta

1). Hasil observasi bahwa aktivitas peserta yang diukur dengan bertanya, menanggapi, dan kerjasama tim mencapai rata-rata 85,68 persen (Baik). 2). Kegiatan terendah terjadi pada hari pertama, yakni dari 100 peserta yang hadir hanya 65 orang atau 65 persen (kurang). 3). Tingkat aktivitas tertinggi dicapai pada hari ketujuh dimana 98 dari 100 orang atau 98 persen (Sangat Puas) aktif bertanya, merespon, dan kerjasama tim.

Sikap dan perilaku peserta

1) Hasil observasi bahwa sikap dan perilaku peserta yang diukur dengan kerapian, salam, kesantunan, dan sopan santun yang dalam bahasa Indonesia disebut 5S (senyum, sapa, sopan santun, dan sopan santun) mencapai rata-rata kehadiran

95,42 persen (Sangat Puas). . 2).

Paling rendah pada hari pertama hanya 90 orang dari 100 orang

Ujian Pre-Test dilaksanakan pada

k.	Tida	Uji	Skor	Rata-rata	Catatan
1.		Pra-Tes	5.969	79,59	N = 96
2.		Post-Tes	6.882	91,76	N = 96
Kemajuan			913	12,17	

yang hadir atau 90 persen (Memuaskan) memenuhi kriteria. 3). Tertinggi pada hari ketujuh yaitu 99 dari 100 peserta yang hadir atau 99 persen (Sangat Memuaskan) memenuhi kriteria.

tanggal 1 November 2021, dan ujian Post-Test dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021. Hasil pre-test dan post-test peserta telah direkapitulasi seperti yang tercatat pada tabel berikut .

Tabel 4.Data rekapitulasi hasil Pre-Test dan Post-Test.

Hasil Pre-Test dan Post-Test

Evaluasi hasil Pre-Test dan Post-Test dilakukan oleh panitia dan peserta melalui lembar soal/soal sesuai jadwal. Dalam evaluasi ini, rentang nilai digunakan:

Tabel 3. Rentang Nilai Pre-Test dan Post-Test

RATA-RATA	KATEGORI
Di bawah 1,50	Lebih sedikit
1,51-3,50	Adil
3.51-5.50	Bagus
5,51-7,5	Baik sekali
7.51-10.00	Puas
10.01-Di Atas	Sangat Puas

Dari hasil diatas, Pelatihan Virtual Penguatan NILAI NASIONAL (TAPLAI) Batch 4 Lemhannas RI tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 913 poin dan rata-rata 12,17 dalam arti “sangat puas” dalam membangun rasa, pemahaman , dan semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Indonesia di lingkungan masing-masing.

<i>hari</i>	<i>Tingkat Kehadiran</i>		dalam organisasi bertanggung jawab	
	<i>Total</i>	<i>Persentase</i>		
	Menghadiri	Tidak menghadiri		
<i>hari pertama</i>	100,00	0,00	100	100.000
<i>hari ke-2</i>	100,00	0,00	100	100.000
<i>hari ke-3</i>	99,00	1,00	100	99.000
<i>hari ke-4</i>	100,00	0,00	100	100.000
<i>hari ke-5</i>	99,00	1,00	100	99.000
<i>hari ke-6</i>	100,00	0,00	100	100.000
<i>hari ke 7</i>	100,00	0,00	100	100.000
Total	698.00	2,00	600	698,000
Rata-rata	99,71	0,29	100	99.710

Tabel 5.Data hasil disiplin peserta.

Gelombang Penguatan Nilai Kebangsaan (Taplai) untuk pembentukan struktur organisasi

Struktur organisasi suatu organisasi mencakup pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan vertikal dan horizontal, yang secara kolektif memfasilitasi pelaksanaan kegiatannya.(Nurlia, 2019). Pengorganisasian individu-individu dalam suatu organisasi, beserta tugas-tugas spesifik yang mereka lakukan, dikenal sebagai struktur organisasi. Struktur ini sangat penting untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan secara efektif dan tujuan organisasi tercapai. Setiap divisi

untuk melaporkan kegiatan mereka. Salah satu aspek penting dalam pelaporan adalah laporan aset tetap, yang memberikan informasi berharga mengenai status aset tetap dan pencapaian pemerintah. Lemhannas dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) mencontohkan fungsi dan tugasnya sebagai sebuah lembaga. Peran utama Lemhannas RI adalah membantu presiden dengan memberikan pendidikan yang komprehensif, terpadu, holistik, dan profesional untuk mengembangkan kader dan memperkuat pemimpin nasional. Para pemimpin tersebut diharapkan dapat mewujudkan karakter, moral, dan etika bangsa dan negara, berwawasan nusantara dan universal. Untuk menjaga keutuhan

NKRI, Presiden mengamanatkan dilaksanakannya kajian konseptual dan strategis dalam berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional. Selain itu juga dilakukan upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan dan peningkatan pemahaman bangsa untuk menumbuhkan jati diri bangsa yang kuat.

Tanggung jawab utama Lemhannas RI mencakup tiga bidang utama. 1) fokus pada penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader, dan penguatan pemimpin di tingkat nasional. 2) mereka melakukan penelitian ekstensif mengenai hal-hal strategis di tingkat nasional, regional, dan internasional, yang mencakup berbagai bidang seperti geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan urusan global. 3) Lemhannas RI berperan penting dalam menjunjung tinggi dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang berakar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI sendiri, dan asas Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan sistem nasional dan menanamkan nilai-nilai tersebut. nilai-nilai inti dalam masyarakat. Tingkat nasional bertugas mengevaluasi dan mengembangkan pendidikan kader dan pemimpin, melakukan kajian konseptual dan strategis terhadap isu-isu nasional, regional, dan internasional, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. 5) Aspek krusial adalah pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional di seluruh Indonesia. 6) Calon pemimpin nasional menjalani pelatihan dan penilaian di bidang kepemimpinan nasional. 7) Dijalin kerjasama dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau

internasional untuk pendidikan pascasarjana bidang ketahanan nasional, serta kajian strategis dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dengan lembaga dalam dan luar negeri. 8) Koordinasi sangat penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Pertahanan Nasional Indonesia. 9) Pengawasan dilakukan untuk menjamin terlaksananya tugas di lingkungan Lemhannas RI dengan baik. 10) Dukungan substantif diberikan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pertahanan Negara RI. Pembinaan yang berkesinambungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung pengembangan organisasi seiring dengan perubahan tersebut (Harefa & Sinambela, 2012).

SIMPULAN

Kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Ketahanan Nasional (Taplai) Lemhannas RI diselenggarakan sebagai salah satu Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia dalam Penguatan Ideologi Berdasarkan 4 Dasar Konsensus Negara dengan tujuan untuk memperkuat karakter Bangsa melalui ideologi, dengan mentransformasikan, menumbuhkan dan melestarikan Nilai-Nilai Nasional kepada seluruh peserta yang berasal dari berbagai kalangan. Diharapkan nilai-nilai kebangsaan yang diberikan dapat secara nyata dan sadar diamalkan dan diimplementasikan dalam setiap pemikiran, sikap, perilaku, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan Virtual Development dan Implementasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasional

Lemhannas RI 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 1-10 November 2021 dengan 100 peserta diperoleh hasil dengan kategori “Sangat Puas” dalam membangun rasa, pemahaman, dan semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat dasar konsensus nasional di lingkungan masing-masing melalui hasil pre-test dan post-test yang telah dilaksanakan. berdampak pada peserta, hal ini terlihat dari tiga kategori penilaian yaitu disiplin, aktivitas, sikap dan perilaku peserta angkatan 4 mencapai skor 1.965 dengan rata-rata 93,56 untuk ketiga kategori penilaian. Dengan adanya fasilitator, peserta cenderung lebih disiplin, aktivitasnya, juga sikap dan perilakunya meningkat, dari rata-rata 85 pada hari pertama menjadi 99 pada hari ketujuh. hadirnya fasilitator yang berkompeten di bidangnya, menambah dampak positif bagi peserta, hal ini terlihat dari tiga kategori penilaian yaitu disiplin, kegiatan, sikap dan perilaku peserta angkatan 4 mencapai skor 1.965 dengan rata-rata 93,56 untuk tiga kategori penilaian. Dengan adanya fasilitator, peserta cenderung lebih disiplin, aktivitasnya, juga sikap dan perilakunya meningkat, dari rata-rata 85 pada hari pertama menjadi 99 pada hari ketujuh. hadirnya fasilitator yang berkompeten di bidangnya, menambah dampak positif bagi peserta, hal ini terlihat dari tiga kategori penilaian yaitu disiplin, kegiatan, sikap dan perilaku peserta angkatan 4 mencapai skor 1.965 dengan rata-rata 93,56 untuk tiga kategori penilaian. Dengan adanya fasilitator, peserta cenderung lebih disiplin, aktivitasnya, juga sikap dan perilakunya meningkat, dari rata-rata 85 pada hari pertama menjadi 99 pada hari ketujuh.

Dengan dibentuknya Struktur Kepengurusan Penguatan Nilai Kebangsaan (Taplai) Batch IV Lemhannas RI 2021 diharapkan juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan di kalangan masyarakat luas dengan program-program yang dibuat oleh masing-masing divisi setiap tahun berbasis nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan perannya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena keberhasilan suatu program adalah terciptanya manfaat yang dihasilkan. Masa manfaat suatu aset mengacu pada perkiraan durasi penggunaannya oleh perusahaan atau perkiraan kuantitas produksi atau unit serupa yang dapat diperoleh dari aset perusahaan. (Handayani, 2013). Maka perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Virtual Penguatan Nilai Nasional (Taplai) diharapkan mampu menggali dan atau mengingat kembali, menggali dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, FCS (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Ahmad, MYA, & Hoter, E. (2019). Kolaborasi Online antara Mahasiswa Arab dan Yahudi Palestina Israel: Ketakutan dan Kecemasan. *Jurnal Internasional Pendidikan Multikultural*, 21(1), 62–81.
- Albintani, M. (2017). PANCASILA DAN IDENTITAS KE-INDONESIA-AN: Sebuah Catatan Krisis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 16(28), 43–49. <https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5825>
- Alfiana, F., Lyesmaya, D., & Uswatun, DA (2019). peningkatan Sikap Semangat Kebangsaan Siswa Melalui Model Value Clarification Technique (VCT) di Kelas Tinggi Sekolah Dasar. *Jurnal Perseda*, 2(2), 47–58. <https://doi.org/10.37150/perseda.v2i2.694>
- Ambarwati, A. (2018). Perilaku dan Teori Organisasi (A. Amirullah, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Media Nusa Kreatif.

Anis, MZA, Hadi, S., Rajani, I., & Abbas, EW (2021). PENGARUH MANAJERIAL KEPEMIMPINAN, BERBAGI PENGETAHUAN DAN INOVASI DI PENDIDIKAN TINGGI. *Jurnal Studi Manajemen Polandia*, 23(1), 59–73. <https://doi.org/10.17512/pjms.2021.23.1.04>

Anugerah, B. (2020). Urgensi Pengelolaan Buzzer Melalui Kebijakan Publik Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 44 (Pertahanan Negara), 33–43.

Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. Di *Jurnal Universitas Medan Area*. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1590>

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, EA (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Budiarta, Polri (2020). Pluralisme hukum dalam pendidikan hukum di Indonesia. *Jurnal Penelitian Lanjutan dalam Hukum dan Ekonomi*, 11(3), 771–774. [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3\(49\).09](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).09)

Gunawan, G. (2015). Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Bina Praja*, 07(04), 347–359. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.347-359>

Ghufron Anik. Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada Kegiatan Pembelajaran. *Cakrawala Pendidikan*, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY

Handayani, M. (2013). Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap untuk meningkatkan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 05(03), 189–196. <https://doi.org/10.21787/JBP.05.2013.189-196>

Harefa, H., & Sinambela, T. (2012). Pengaruh Pembinaan terhadap Motivasi Kerja dan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi: Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai). *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 207–216. <https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.207-216>

Hastangka, Armawi, A., & Kaelan. (2019). Dampak Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Terhadap Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kewarganegaraan: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 98–110. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index>

Kusumaningtyas, RF, & Derozari, RG (2019). Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Virtual dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 339. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.339-348>

Lemhana. (2020, 14 September). Lemhannas RI Selenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Secara Virtual. Halaman Web Lemhannas. <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/894-lemhannas-ri-selenggarakan-pemantapan-nilai-nilai-kebangsaan-secara-virtual>

Lemhana. (2022). Kedudukan dan Fungsi. Halaman Web Lemhannas. www.lemhannas.go.id/index.php/profil/kedudukan-tugas-dan-fungsi

Mahardika, AG (2019). Politik Hukum Hierarki TAP MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 344–352.

Masbiran, V., Murliasari, R., Afriyanni, A., & Wulandari, S. (2021). Elemen Hambatan dan Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Interpretive Structural Modelling. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 445–457. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.445-457>

Nadeak, H. (2014). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. *Jurnal Bina Praja*, 06(03), 183–195. <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.183-195>

Nurlia, N. (2019). Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan. *Jurnal Meraja*, 2(2), 51–66.

Nurmalisa, Y., & Adha, MM (2016). PERAN LEMBAGA SOSIAL TERHADAP PEMBINAAN MORAL REMAJA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 64–71. <https://doi.org/10.17977/um017v2i12016p064>

Rahmawati, I. (2020). Analisis yuridis-normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4047>

Ratmanto, E. (2021). Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar (Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar). *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(1), 43–50.

Retno, AS, Furnamasari, YF, & Dewi, DA (2021). Penguatan Nilai Kebangsaan Pancasila sebagai Pondasi Karakter Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Zaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9347–9378. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i3.180>

Rivai, A. (2017). Indonesia Setelah Joko Widodo: Peningkatan Politik dan Administrasi Publik. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 255–264. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.255-264>

Rukmana, IS, Samsuri, S., & Wahidin, D. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Contoh Nyata Ketahanan Ideologi (Studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosari, Desa Tirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 182. <https://doi.org/10.22146/jkn.53815>

Santoso, R., & Wuryandani, W. (2020). Pengembangan Bahan Ajar PPKn Berbasis Kearifan Lokal Guna meningkatkan Ketahanan Budaya Melalui Pemahaman Konsep Keberragaman. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 229. <https://doi.org/10.22146/jkn.56926>

Sarbaini, S., Jumadi, J., Abbas, EW, & Rajiani, I. (2019). MENGELOLA E-LEARNING DI PERGURUAN UMUM DENGAN MENYELURUH PERAN BUDAYA. *Jurnal Studi Manajemen Polandia*, 20(1), 394–404. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.1.34>

Sati, NI (2019). Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 834–846. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>

Setiawan, H., & Ode, S. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai, Kabupaten Serang. *Jurnal Pemerintah*, 4(2), 173–197.

Sugiarti, I., Nugroho, S., Ruhban, A., & Nasir, M. (2020). Modul Pendidikan Pancasila di Politeknik Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan.

Sumardjoko, B., Supriyanto, E., & Prayitno, H. (2018). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Perekat Masyarakat Multikultural. Prosiding Konferensi Internasional tentang Pelatihan dan Pendidikan Guru 2018 (ICTTE 2018). <https://doi.org/10.2991/ictte-18.2018.66>

Suriata, IN (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda dalam Peningkatan Ketahanan Nasional. Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 47–56.

Suryatni, L. (2016). Wawasan Kebangsaan Sebagai Pencerminan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal Elektronik Widya Non-Eksakta, 1(1), 46-55

Susianti, N. (2017). Strategi Pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Jambi. Jurnal Bina Praja, 9(2), 243–253. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.243-253>

Toga, LS (2021). SISTEM HUKUM PIDANA TERHADAP CEK/BILYET GIRO KOSONG. To-Ra, 7(1), 199–207. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

Vickery, AE (2016). "Saya Khawatir tentang Komunitas Saya": Wanita Afrika Amerika Memanfaatkan Gagasan Komunal Kewarganegaraan di Kelas Ilmu Sosial. Jurnal Internasional Pendidikan Multikultural, 18(1), 28–44. <https://doi.org/10.18251/ijme.v18i1.1061>

Wiswayana, WM, & Pinatih, NKDA (2020). PANDEMI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 8(2), 104-112.

Wulandari, PK, Saraswati, D., & Damayanti, G. (2020). Ketahanan Sosial Pemuda Dalam Pengelolaan Wisata Budaya (Studi Pada Yayasan Lasem Heritage Di Lasem, Rembang, Jawa Tengah). Jurnal Ketahanan Nasional, 26(2), 249. <https://doi.org/10.22146/jkn.56994>

Yuniar, R., & Setra, GPY (2020). Mind-Mapping Nilai Penting dan Pengaruh Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Degradasi Pembangunan Daerah Perbatasan Jayapura Guna meningkatkan Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 41(Pertahanan Negara), 47–60.